



# RENCANA AKSI KINERJA 2022

PENGADILAN NEGERI  
PONTIANAK





## **Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2022**

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam rangka mewujudkan Visi misi Pengadilan Negeri Pontianak. Adapun Visi Pengadilan Negeri Pontianak yaitu:

### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG AGUNG”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pontianak, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2022 mencantumkan program, Kegiatan, Target dan Anggaran sebagaimana terlampir pada matrik di bawah ini.

## RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	75%	80%	90%	90%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	30%	50%	75%	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	20%	40%	60%	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	5%	8%	10%
		Index kepuasan pencari keadilan	0%	85%	0%	85%

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2022  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

NO	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Melakukan pendataan sisa perkara perdata tahun lalu	V				Terdatanya sisa perkara perdata tahun lalu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelesaian Sisa Perkara Perdata	Rp15.228.221.000,-
2	Mengevaluasi sisa perkara perdata tahun lalu	V				Identifikasi mengenai permasalahan penghambat penyelesaian perkara perdata				
3	Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu	V	V	V		Terselesaikannya sisa perkara perdata tahun lalu				
4	Pembuatan berita acara persidangan sesuai SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu dan upload BAS pada SIPP tepat waktu				
5	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	V	V	V	V	Pelaksanaan pemberitahuan putusan dilaksanakan tepat waktu				

6	pelaksanaan minutasi perkara perdata tepat waktu	V	V	V	V	Minutasi perkara perdata dilaksanakan tepat waktu				
7	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara perdata	V	V	V	V	Terdata dan terdeteksinya potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu				
8	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perdata perbulan	V	V	V	V	Terevaluasinya data penyelesaian perkara perdata perbulan				
9	Melakukan pendataan sisa perkara perdata khusus tahun lalu	V				Terdatanya sisa perkara perdata khusus tahun lalu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Khusus	Rp15.228.221.000,-
10	Mengevaluasi sisa perkara perdata khusus tahun lalu	V				Identifikasi mengenai permasalahan penghambat penyelesaian perkara perdata khusus				
11	Menyelesaikan sisa perkara perdata khusus tahun lalu	V	V	V		Terselesaikannya sisa perkara perdata khusus tahun lalu				
12	Pembuatan berita acara persidangan sesuai SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu dan upload				

						BAS pada SIPP tepat waktu				
13	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	V	V	V	V	Pelaksanaan putusan dilaksanakan tepat waktu				
14	Pelaksanaan minutasi perkara perdata khusus tepat waktu	V	V	V	V	Minutasi perkara perdata khusus dilaksanakan tepat waktu				
15	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara perdata khusus	V	V	V	V	Terdata dan terdeteksinya potensi penyelesaian perkara khusus melebihi ketentuan waktu				
16	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata khusus dan sisa perkara perdata khusus perbulan	V	V	V	V	Terevaluasinya data penyelesaian perkara perdata khusus perbulan				
17	Melakukan pendataan sisa perkara pidana tahun lalu melalui aplikasi SIPP	V				Terdatanya sisa perkara pidana tahun lalu	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat	Peningkatan Management Peradilan Umum	Penyelesaian Sisa Perkara Pidana	Rp315.000.000,-
18	Mengevaluasi sisa perkara pidana tahun lalu	V				Identifikasi mengenai permasalahan penghambat				

						penyelesaian perkara pidana				
<b>19</b>	Menyelesaikan sisa perkara pidana tahun lalu	<b>V</b>	<b>V</b>			Terselesaikannya sisa perkara pidana tahun lalu				
<b>20</b>	Pembuatan Berita Acara Persidangan Sesuai SOP	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu dan upload BAS pada SIPP tepat waktu				
<b>21</b>	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Pelaksanaan pemberitahuan putusan dilaksanakan tepat waktu				
22	Pelaksanaan minutasi perkara pidana tepat waktu	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Minutasi perkara pidana dilaksanakan tepat waktu				
23	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Terdata dan terdeteksinya potensi penyelesaian pidana melebihi ketentuan waktu				
24	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara pidana perbulan	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Terevaluasinya data penyelesaian perkara pidana perbulan				
<b>25</b>	Melakukan pendataan sisa perkara pidana khusus tahun	<b>V</b>				Terdatanya sisa perkara pidana khusus tahun lalu	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat	Peningkatan Management Peradilan Umum	Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Khusus	Rp315.000.000,-

	lalu melalui aplikasi SIPP						Pertama Diwilayah Kalimantan Barat			
26	Mengevaluasi sisa perkara pidana khusus tahun lalu	V				Identifikasi mengenai permasalahan penghambat penyelesaian perkara pidana khusus				
27	Menyelesaikan sisa perkara pidana khusus tahun lalu	V	V			Terselesaikannya sisa perkara pidana khusus tahun lalu				
28	Pembuatan berita acara persidangan sesuai SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu dan upload BAS pada SIPP tepat waktu				
29	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	V	V	V	V	Pelaksanaan pemberitahuan putusan dilaksanakan tepat waktu				
30	Pelaksanaan minutasi perkara pidana khusus tepat waktu	V	V	V	V	Minutasi perkara pidana khusus dilaksanakan tepat waktu				
31	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana khusus	V	V	V	V	Terdata dan terdeteksinya potensi penyelesaian pidana khusus melebihi ketentuan waktu				

32	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara pidana khusus perbulan	V	V	V	V	Terevaluasinya data penyelesaian perkara pidana khusus perbulan				
33	Mendata pendaftaran perkara perdata pada E-Court dan mendaftarkan perkara perdata pada setiap bulannya pada aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara perdata yang terdaftar pada E-Court ditangani teridentifikasi dan terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp15.228.221.000,-
34	Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara perdata	V	V	V	V	Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar				
35	Mengidentifikasi pelaksanaan persidangan perkara perdata pada setiap bulannya	V	V	V	V	Terdapat dan terdeteksinya potensi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp15.228.221.000,-
36	Pembuatan dan proses upload Berita acara perkara perdata persidangan sesuai dengan SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan Selesai tepat waktu				

37	Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Perdata Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Perkara perdata diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan				
38	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata dan sisa perkara perdata setiap bulannya	V	V	V	V	Terdeteksinya potensi penyelesaian perkara perdata				
39	Mengidentifikasi pelaksanaan persidangan perkara perdata khusus pada setiap bulannya	V	V	V	V	Terdata dan terdeteksinya potensi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata khusus	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp15.228.221.000,-
40	Pembuatan dan proses upload	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan				

	Berita acara persidangan perkara perdata khusus sesuai dengan SOP					Selesai tepat waktu				
41	Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Perdata Khusus Tidak Melebihi Waktu 50 (lima puluh) hari kerja Sesuai UU No. 2 Tahun 2004	V	V	V	V	Perkara perdata diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 50 (lima puluh) hari kerja Sesuai UU No. 2 Tahun 2004				
42	Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata khusus dan sisa perkara khusus perdata setiap bulannya	V	V	V	V	Terdeteksinya potensi penyelesaian perkara perdata khusus				
43	Mendata pendaftaran perkara pidana dan pidana khusus setiap bulannya pada aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara pidana dan pidana khusus ditangani teridentifikasi dan terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat	Peningkatan Management Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp315.000.000,-
44	Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara pidana dan pidana khusus	V	V	V	V	Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar				

45	Pembuatan dan proses upload berita acara perkara pidana pada aplikasi SIPP persidangan sesuai dengan SOP	V	V	V	V	Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu				
46	Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Pidana Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Perkara Pidana diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan				
47	Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana dan pidana khusus setiap bulannya	V	V	V	V	Terdeteksinya potensi penyelesaian dan pelaksanaan persidangan perkara pidana				

						dan pidana khusus				
48	Mendata jumlah perkara yang telah diputus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada setiap bulannya	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara yang diputus dan telah dinyatakan BHT	Penanganan Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama	Peningkatan Management Peradilan Umum	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Rp315.000.000,-
49	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara yang mengajukan hukum banding	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara dan pelaksanaan perkara yang mengajukan upaya hukum banding				
50	Mendata jumlah perkara yang telah diputus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada setiap bulannya	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara yang diputus dan telah dinyatakan BHT	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Peningkatan Management Peradilan Umum	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Rp315.000.000,-
51	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara yang mengajukan hukum kasasi	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara dan pelaksanaan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi				
52	Mendata jumlah perkara yang	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara	Penanganan Perkara	Peningkatan Management	Persentase Perkara Yang	Rp315.000.000,-

	yang telah di putus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada setiap bulannya					yang diputus dan telah dinyatakan BHT	Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Peradilan Umum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	
53	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara yang mengajukan hukum peninjauan kembali	V	V	V	V	Teridentifikasinya jumlah perkara dan pelaksanaan perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali				
54	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana anak pada setiap bulannya	V	V	V	V	Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana anak pada setiap bulannya	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat	Peningkatan Management Peradilan Umum	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Rp315.000.000,-
55	Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	V	V	V	V	Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi				
56	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat		V		V	Terbentuknya tim evaluasi survey kepuasan masyarakat	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Rp15.228.221.000,-
57	Menyusun job description tim		V		V	Tersusunnya job description tim				

	evaluasi kepuasan masyarakat					evaluasi kepuasan masyarakat	Mahkamah Agung RI	Urusan Administrasi		
58	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat		V		V	Tersusunnya jadwal pelaksanaan dan perangkat pendukung yang diperlukan oleh tim survey kepuasan masyarakat				
59	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat		V		V	Kuisisioner SKM Telah Diisi Oleh Responden				
60	Mendata Dan Merekap Hasil SKM		V		V	Data Hasil SKM				
61	Menyusun Laporan SKM		V		V	Laporan SKM Telah Terdokumentasi				
62	Melakukan evaluasi Berdasarkan Hasil SKM Dan Melakukan Tinjauan Managemen		V		V	Hasil Tindak Lanjut SKM Dari Hasil Rapat Tinjauan Manajamen				

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	30%	50%	70%	90%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	30%	50%	70%	90%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0%	2%	5%	7%
		Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding Kasasi, Dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	25%	50%	70%	90%
		Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	25%	50%	70%	90%

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2022  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Penyelesaian Perkara Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Rp15.228.221.000,-
2	Pembuatan Putusan Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang	V	V	V	V	Putusan Telah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi SIPP Dan Ditektori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari				

	Sama Saat Putusan Dibacakan					Yang Sama Saat Putusan Dibacakan				
3	Pembuatan Salinan Putusan Perkara Perdata Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP	V	V	V	V	Salinan Putusan Perkara Perdata Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP				
4	Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata	V	V	V	V	Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata				
5	Penyelesaian Perkara Pidana Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	V	V	V	V	Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Rp75.000.000,-
6	Pembuatan Putusan Perkara Pidana Dan	V	V	V	V	Putusan Perkara Pidana Telah				

	Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan					Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan				
7	Pembuatan Salinan Putusan Perkara Pidana Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP	V	V	V	V	Salinan Putusan Perkara Pidana Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP				
8	Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana	V	V	V	V	Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana				
9	Penetapan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Penetapan Hakim Mediator	V				Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Penetapan Hakim Mediator	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Rp15.228.221.000,-
10	Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata Gugatan Dan Perdata Gugatan Sederhana Untuk Dilaksanakan Proses Mediasi	V	V	V	V	Terdatanya Perkara Perdata Gugatan Dan Perdata Gugatan Sederhana Untuk Dilaksanakan Proses Mediasi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Rp15.228.221.000,-

11	Penunjukan Hakim Mediator Yang Menangani Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana	V	V	V	V	Surat Penunjukan Hakim Mediator Yang Menangani Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana				
12	Pelaksanaan Proses Mediasi Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana	V	V	V	V	Terlaksananya Proses Mediasi Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana				
13	Mendata Dan Mengidentifikasi Hasil Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana	V	V	V	V	Terdata Dan Teridentifikasinya Potensi Hasil Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana				
14	Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali	V	V	V	V	Terdata Dan Teridentifikasinya Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Kalimantan barat	Peningkatan manajemen peradilan umum	Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding Kasasi, Dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Rp3.500.000,-
15	Mempersiapkan Dokumen Dukung Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali	V	V	V	V	Dokumen Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Lengkap				

16	Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan Kembali secara tepat waktu sesuai SOP	V	V	V	V	Berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali dikirimkan secara lengkap dan tepat waktu				
17	Mendata Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Perkara Khusus Tipikor)	V	V	V	V	Data Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Perkara Khusus Tipikor)	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Kalimantan barat	Peningkatan manajemen peradilan umum	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	Rp53.400.000,-
18	Memeriksa Status Dan Jenis Publikasi Pemeriksaan Perkara	V	V	V	V	Status Dan Jenis Publikasi Perkara				
19	Memeriksa Dan Mengidentifikasi Berkas Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Perkara Khusus Tipikor)	V	V	V	V	Berkas Putusan Lengkap				
20	Mengupload dan publikasi putusan kedalam aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	V	V	V	V	Putusan terupload dan terpublikasi kedalam aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI				

## RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%	0%	0%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Pengadilan	0%	0%	0%	90%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	50%	70%	80%	90%

### JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2022 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Mendata Dan Mengidentifikasi Pendaftaran Perkara Prodeo	-	-	-	-	Data Perkara Prodeo	Perkara Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Di Wilayah Kalimantan Barat	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0
2	Mendata Dan Mengidentifikasi Pendaftaran Perkara Yang Diselesaikan Diluar	-	-	-	-	Data Penanganan Perkara Diluar Pengadilan (Zetting Plaat)	Perkara Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Di Wilayah	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	0

	Gedung Pengadilan (Zetting Plaat)						Kalimantan Barat			
3	Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum	V				Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum	Layanan Bantuan Hukum Peseorangan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Jumlah Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Rp48.000.000,-
4	Mengevaluasi hasil Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum	V				Terdata Dan Teridentifikasinya Hasil Tes Wawancara Penyedia Jasa Bantuan Hukum				
5	Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU)	V				Memorandum Of Understanding (MoU) Dengan Penyedia Jasa Bantuan Hukum				
6	Pelaksanaan Pelayanan POSBAKUM (4 jam Pelayanan / 120 Orang Yang Memperoleh Pelayanan POSBAKUM)	V	V	V	V	Pelaksanaan Pelayanan POSBAKUM				
7	Pelaksanaan Pembayaran Honor Advokat/Pengacara Piket (POSBAKUM)	V	V	V	V	Pembayaran Honor Advokat/Pengacara Piket (POSBAKUM)				

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	0%	0%	0%	0%

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2022  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

NO	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PELAKSANAAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata Gugatan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Setiap Bulannya	V	V	V	V	Data Perkara Perdata Gugatan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A
2	Mendata Dan Mengidentifikasi Permohonan Eksekusi Setiap Bulannya	V	V	V	V	Data perkara permohonan eksekusi				
3	Memeriksa Kelengkapan Berkas Pengajuan Permohonan Eksekusi	V	V	V	V	Berkas perkara permohonan eksekusi lengkap				
4	Mendaftarkan Permohonan Eksekusi Yang Telah Dinyatakan Lengkap Pada Aplikasi SIPP	V	V	V	V	Perkara Permohonan Eksekusi Terdaftar Kedalam Aplikasi Sipp	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	N/A
5	Penunjukan Jurusita	V	V	V	V	Surat Penetapan Jurusita				

6	Membuat Surat Penetapan Teguran Eksekusi	V	V	V	V	Surat Penetapan Teguran Eksekusi				
7	Membuat Penetapan Sita Eksekusi	V	V	V	V	Surat Penetapan Sita Eksekusi				
8	Melaksanakan Eksekusi	V	V	V	V	Pelaksanaan Eksekusi				
9	Membuat Laporan Hasil Eksekusi	V	V	V	V	Laporan Pelaksanaan Eksekusi				
10	Mengidentifikasi Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi	V	V	V	V	Teridentifikasi Potensi Pelaksanaan Eksekusi				


 Dikeluarkan di Pontianak  
 pada tanggal 3 Januari 2022  
 Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
  
**FRANCIS SINAGA, S.H., M.H.**  
 NIP. 196302241992121001


# RENCANA AKSI KINERJA 2022

## PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

 (0561) 734100, FAX. (0561) 763214, 763196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)